



Analisis Faktor Penyebab Serta Cara Mengatasi Keterlambatan Proyek Infrastruktur Desa Di Kabupaten Rokan Hulu

Arifal Hidayat^{1,*}, Heri Suropto², Yuli Afrina³

¹Program Studi Teknik Sipil
Universitas Pasir Pengaraian
Jl. Tuanku Tambusai, Rambah,
Kec. Rambah Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu, Riau 28558
arifal.upp@upp.ac.id

²Program Studi Teknik Mesin
Universitas Pasir Pengaraian
Jl. Tuanku Tambusai, Rambah,
Kec. Rambah Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu, Riau 28558
heri.suriptodotone@gmail.com

³Guru IPAS SMKN 5
SMK Negeri 5 Pekanbaru
Jl. KML Yos Sudarso
Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai,
Kota Pekanbaru, Riau 28265
yuliafrina79@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi dari pemerintah desa, BPD dan kepala dusun terhadap faktor penyebab serta cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang didasarkan pada data hasil pengukuran variabel penelitian melalui studi pustaka dan penyebaran kuesioner kepada 18 responden. Kemudian data kuesioner yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis indeks kepentingan dan analisis statistik korelasi produk momen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Faktor penyebab keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam tahun 2023 menurut urutan ranking adalah : (a) *Non Excusable Delays* (Keterlambatan proses pencairan dana desa); (b) *Conpesable Delays* (Dana dari pemilik yang tidak mencukupi); (c) *Excusable Delays* (Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek); 2. Cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam untuk tahun yang akan datang adalah : (a) Meminta pertanggung jawaban TPK agar tetap menyelesaikan pembangunan tepat waktu; (b) Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan; (c) Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner.

Kata kunci: penyebab keterlambatan; serta cara mengatasinya; desa babussalam

ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out the perception of the village government, BPD and hamlet heads on the cause factors and how to overcome delays in infrastructure activities in Babussalam Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency. This type of research is a quantitative research method, which is a method based on data from the measurement of research variables through literature studies and the distribution of questionnaires to 18 respondents. Then the questionnaire data obtained was analyzed using the importance index analysis method and statistical analysis of the correlation of moment products. The results of the study concluded that: 1. The factors causing the delay of infrastructure projects in Babussalam Village in 2023 according to the ranking order are: (a) *Non Excusable Delays* (Delay in the disbursement process of village funds); (b) *Conpesable Delays* (Insufficient Funds from Owners); (c) *Excusable Delays* (Response from the surrounding community who are less supportive of the project); 2. How to overcome the delay in infrastructure activities in Babussalam Village for the coming year is: (a) Holding TPK accountable to continue to complete the development on time; (b) Drafting planning work contracts and conducting supervision; (c) Choosing the best and fastest work method, increasing the number of workers, increasing the number of tools, improving performance, submitting additional time to the owner.*

Keywords: causes of delays; and how to overcome them; babussalam village.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 7 tahun 2023 bahwa pagu dana desa untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 71 triliun, akan dialokasikan kepada

Corresponding Author:
✉ Arifal Hidayat
Accepted on: 2024-06-28

75.259 desa di 434 kota/kabupaten. Prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2024 yaitu bantuan BLT bagi masyarakat miskin, kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan pola padat karya tunai desa (PKTD) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa [5]. Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Bab I Pasal 2 ayat 1-2 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong [2].

Tahun 2023 Desa Babussalam Kecamatan Rambah mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 1.692.000.000, yang dibagi untuk kegiatan infrastruktur 60% yaitu sebesar Rp. 1.015.200.000. Berdasarkan laporan realisasi kegiatan infrastruktur hanya 89% dapat terlaksana untuk kegiatan pembangunan desa, dan 11% kegiatan infrastruktur mengalami keterlambatan [11].

Dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur di desa sering timbul permasalahan-permasalahan di lapangan yang dapat mengakibatkan waktu penyelesaian infrastruktur tidak sesuai dengan rencana sehingga mengalami keterlambatan. Hidayat A, Afrina Y (2020), dalam penelitiannya bahwa faktor utama klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba menurut persepsi satker DPMD Kabupaten Rokan Hulu adalah: (1) Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik; (2) Dokumen kegiatan kurang tertib; (3) Sistem organisasi kegiatan buruk; (4) Penyiapan sumber daya kegiatan terbatas; (5) Control dan evaluasi kegiatan yang kurang baik; (6) Sistem penyusunan rencana yang kurang matang; (7) Lain-lain (diluar kemampuan TPK) [8].

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dalam Pasal 27 disebutkan dengan jelas tentang sanksi keterlambatan, mulai dari memberikan sanksi administratif kepada kepala desa berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA dana desa bahkan sanksi berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA dana desa tahun berjalan. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati/walikota [3].

Sejauh ini faktor utama penyebab terjadinya keterlambatan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hulu di Desa Babussalam Kecamatan Rambah belum teridentifikasi dengan sistematis, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap faktor penyebab dan cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam menurut persepsi pihak pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perwakilan masyarakat yang ada di lokasi pembangunan infrastruktur yang tersebar di 5 dusun.

1.1 Keterlambatan (*Delays*)

Menurut Ervianto (2013), keterlambatan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. Keterlambatan proyek dapat diidentifikasi, didefinisikan dan digambarkan dengan jelas melalui media *schedule*. *Schedule* memegang peranan penting dalam mendefinisikan, mengidentifikasi keterlambatan dalam suatu proyek. Dengan melihat *schedule*,

keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi [7].

Scott (2017), keterlambatan adalah apabila suatu aktifitas atau kegiatan proyek konstruksi mengalami penambahan waktu, atau tidak diselenggarakan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Keterlambatan proyek dapat diidentifikasi dengan jelas melalui *schedule*. Dengan melihat *schedule*, akibat keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi [12]

1.2 Penyebab Keterlambatan

Menurut Kraiem dan Dickmann (1987), penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan proyek dibagi dalam 3 kelompok [9], yaitu:

1. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (*Non-Excusable Delay*), yakni keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian/kesalahan pemilik proyek. Bagian dari *non-excusable delay* adalah :
 - a) Identifikasi aktivitas proyek
 - b) Gambar rencana proyek yang tidak jelas
 - c) Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja
 - d) Kualitas tenaga kerja yang buruk
 - e) Keterlambatan penyediaan alat/material
 - f) Penanganan keberadaan dan kualitas dari alat/material yang buruk
 - g) Jenis peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan proyek
 - h) Kesulitan finansial
 - i) Kurangnya pengalaman kontraktor
 - j) Koordinasi dan komunikasi yang buruk dalam organisasi
 - k) Metode konstruksi/teknik pelaksanaan yang salah/tidak tepat
 - l) Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja/pengunjung.

2. Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (*Compensable Delays*), yakni keterlambatan yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik. Bagian dari *compensable delays* adalah :
 - a) Penetapan pelaksanaan jadwal proyek yang amat ketat
 - b) Persetujuan ijin kerja yang lama
 - c) Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi
 - d) Sering terjadi penundaan pekerjaan
 - e) Keterlambatan penyediaan material
 - f) Dana dari pemilik yang tidak mencukupi.

3. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (*Excusable Delays*), yakni keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kendali baik pemilik maupun kontraktor. Keterlambatan jenis ini dikenal dalam kontrak dengan nama *force majeure*. Bagian dari *excusable delays* ini adalah :
 - a) Terjadinya hal-hal yang tak terduga seperti banjir, badai, gempa bumi, tanah Longsor, cuaca buruk, *force majeure*
 - b) Lingkungan sosial politik yang tidak stabil
 - c) Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung
 - d) Pembengkakan biaya proyek
 - e) Informasi proyek yang kurang lengkap
 - f) Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja.

1.3 Dampak Keterlambatan

Obrien (2019), menyimpulkan bahwa dampak dari keterlambatan akan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

1. Bagi pemilik, keterlambatan menyebabkan kehilangan penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah bisa digunakan atau disewakan.
2. Bagi kontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek berarti naiknya *over head* karena bertambah panjang waktu pelaksanaan, sehingga merugikan kemungkinan naiknya harga karena inflasi dan naiknya upah buruh, juga akan tertahannya modal yang kemungkinan besar dapat dipakai untuk proyek lain.

3. Bagi konsultan, keterlambatan akan mengalami kerugian waktu, karena dengan adanya keterlambatan tersebut konsultan yang bersangkutan akan terhambat dalam mengerjakan proyek lainnya [10].

1.4 Mengatasi Keterlambatan

Dipohusodo (2016), menyatakan selama proses konstruksi selalu saja muncul gejala kelangkaan periodik atas material-material yang diperlukan, berupa material dasar atau barang jadi baik yang lokal maupun *import* dan lain sebagainya. Cara mengendalikan keterlambatan adalah :

- 1) Mengerahkan sumber daya tambahan
- 2) Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana
- 3) Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula mungkin diperlukan revisi jadwal, yang untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan pekerjaan pada saat berikutnya
- 4) Meminta pertanggungjawaban TPK agar tetap menyelesaikan proyek tepat waktu. Jika terjadi kelalaian akan dikenakan denda keterlambatan proyek
- 5) Memilih metode kerja yang terbaik dan efektif, menambah jumlah tenaga kerja dan mengajukan kerja lembur
- 6) Membuat kontrak kerja perencanaan dan pengadaan pengawasan
- 7) Ikut membantu agar proyek cepat selesai, mengajukan proposal agar diberikan dana tambahan untuk perbaikan akibat gangguan di proyek [6].

1.5 Indeks Kepentingan

Teknik analisis ini berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatannya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu. Rumus indeks kepentingan [13]". Rumus indeks kepentingan (*mean rank*) adalah:

$$\text{Mean} = I = \sum_{i=1}^4 \frac{a_i X_i}{N}$$

keterangan:

- I = indeks kepentingan
 N = jumlah responden
 X_i = frekuensi jawaban dari setiap persepsi (1,2,3,4)
 X_1 = frekuensi jawaban tidak berpengaruh (TB)
 X_2 = frekuensi jawaban kurang berpengaruh (KB)
 X_3 = frekuensi jawaban berpengaruh (B)
 X_4 = frekuensi jawaban sangat berpengaruh (SB)
 a_i = nilai atas persepsi/opini yang diberikan (1,2,3,4).

Untuk penilaian hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari tiap masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian.

1.6 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambang R [13]. Dasar pengambilan keputusan penelitian untuk memeriksa keakuratan item kuesioner adalah:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel, dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ r tabel, dinyatakan tidak valid.

Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, berikut untuk menentukan nilai t hitung:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \times \sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2) \times (N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

- N = jumlah kuesioner
- X = skor pertanyaan (1,2,3,4)
- Y = skor total
- XY = skor pertanyaan dikalikan skor total
- r = korelasi produk momen.

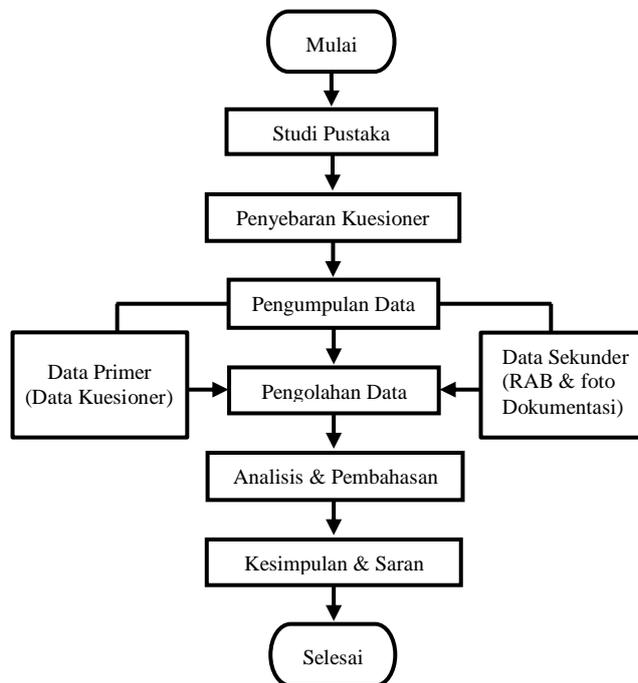
Tabel 1. Nilai koefisien korelasi R

Nilai r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

2. MATERIAL DAN METODE

2.1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar tahapan penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan penelitian

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam Kecamatan Rambah tahun 2023.

2.3 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah aparat desa (kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan), tim pelaksana kegiatan (TPK), kepala dusun (I,II,III,IV,V), Badan

Permusyawaratan desa (BPD) dan perwakilan masyarakat yang terdampak di lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

2.4 Sampel Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 18 responden, yang terdiri dari perangkat desa = 8 responden, kadus = 5 responden dan BPD = 5 responden.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara :

- 1) Data pendukung penelitian, yaitu : profil desa, pagu dana desa tahun 2023, kegiatan fisik tahun 2023, rencana kegiatan pembangunan infrastruktur tahap I, II, III tahun 2023, Gambar dan RAB kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2023.
- 2) Survei lapangan, melakukan cek fisik proses kegiatan infrastruktur tahap I, II, III tahun 2023 Desa Babussalam. Dari hasil cek fisik lapangan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pembandingan apakah sesuai rencana dan realisasi secara sistematis sampai didapat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.
- 3) Studi kepustakaan
Mengumpulkan data dan informasi sebagai landasan teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara mengkaji literatur-literatur berupa jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.6 Rancangan Kuesioner

Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin. Kuesioner dirancang dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Data responden dan data proyek, terdiri dari jabatan responden, pendidikan, pengalaman dan lain-lain.
- 2) Indikator faktor penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur Desa Babussalam Kecamatan Rambah.
- 3) Indikator cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur Desa Babussalam Kecamatan Rambah.

2.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Analisis profil responden dan profil proyek
Maksud dari analisis ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang profil responden dan profil proyek infrastruktur didesa. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel.
- 2) Analisis indeks kepentingan
Teknik analisis ini untuk menentukan peringkat (rangking) dari faktor penyebab dan cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Analisis Validitas dan reliabilitas
Dalam pengujian validitas dan reliabilitas penelitian ini menggunakan rumus teknik korelasi produk momen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dianalisis merupakan hasil penelitian yang dikumpulkan dari 18 responden yang merupakan sampel penelitian, yang disebarkan menggunakan kuesioner kepada pihak pemerintah Desa Babussalam Kecamatan Rambah.

3.1 Analisis Terhadap Profil Responden

Berikut hasil keseluruhan persentase pada kategori profil responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil responden

Kategori	Persentase (%)
Jabatan responden	
a) Kades dan perangkat desa	44
b) BPD dan anggota	28
c) Kadus I, II, III, IV, V	28
Usia responden	
a) 18 – 28 tahun	17
b) 29 – 38 tahun	28
c) 39 – 48 tahun	39
d) > 49 tahun	16
Pendidikan responden	
a) SMA/SMK	33
b) D3	16
c) S1	51
Pengalaman responden	
a) 1 – 5 tahun	11
b) 5 – 10 tahun	33
c) > 10 tahun	56

3.2 Analisis Terhadap Profil Proyek

Tabel 3. Profil proyek

Kategori	Persentase (%)
Besar pagu dana desa untuk kegiatan infrastruktur	
a) 51 jt – 100 jt	6
b) 101 jt – 150 jt	16
c) > 151 jt	78
Apakah proyek pernah mengalami keterlambatan	
a) Pernah	61
b) Tidak	39
Persentase rata-rata keterlambatan	
a) 5 – 10%	61
b) 11 – 15%	0
c) 16 – 20%	0

3.3 Analisis Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Infrastruktur Tahun 2023

Hasil rangkuman persepsi responden terhadap faktor penyebab serta cara mengatasi keterlambatan proyek infrastruktur di Desa babussalam dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Faktor Penyebab keterlambatan Proyek

No	Indikator Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Infrastruktur	Jawaban Responden				
		SB	B	KB	TB	Jlh
A	<i>Non Excusable Delays</i>					
A1	Identifikasi aktivitas pembangunan Infrastruktur	0	14	4	0	18
A2	Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja	6	10	2	0	18
A3	Kualitas tenaga kerja yang buruk	10	8	0	0	18
A4	Keterlambatan penyediaan alat/material	12	6	0	0	18
A5	Keterlambatan proses pencairan dana desa	13	5	0	0	18
A6	Kurangnya pengalaman TPK	8	10	0	0	18
A7	Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja	4	10	4	0	18

A8	Metode konstruksi/teknik pelaksanaan yang tidak tepat/salah	3	8	7	0	18
A9	Koordinasi dan komunikasi yang buruk dalam organisasi proyek	1	8	9	0	18
A10	Banyak hasil pekerjaan yang harus diulang/diperbaiki karena cacat/salah	4	11	3	0	18
B	Compensable Delays					
B1	Penetapan pelaksanaan jadwal proyek yang amat ketat	3	7	8	0	18
B2	Persetujuan ijin kerja yang lama	2	8	8	0	18
B3	Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi	4	12	2	0	18
B4	Sering terjadi penundaan pekerjaan	7	10	1	0	18
B5	Keterlambatan penyediaan material	11	7	0	0	18
B6	Dana dari pemilik yang tidak mencukupi	12	6	0	0	18
C	Excusable Delays					
C1	Terjadinya hal-hal yang tak terduga seperti banjir, badai, gempa bumi, tanah Longsor, cuaca buruk	8	6	4	0	18
C2	Lingkungan sosial politik yang tidak stabil	9	6	3	0	18
C3	Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek	10	6	2	0	18
C4	Pembengkakan biaya proyek	7	6	5	0	18
C5	Informasi proyek yang kurang lengkap	7	7	4	0	18
C6	Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja	6	9	3	0	18

Tabel 5. Cara Mengatasi Keterlambatan Proyek

No	Indikator Pilihan	Jawaban Responden				
		SB	B	KB	TB	Jlh
1	Mengerahkan sumber daya tambahan	4	11	3	0	18
2	Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana	9	6	3	0	18
3	Jika tidak mungkin tetap pada rencana semula, diperlukan revisi jadwal, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan pekerjaan berikutnya	4	10	4	0	18
4	Meminta pertanggung jawaban TPK agar tetap menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Jika terjadi kemunduran dikenakan denda keterlambatan pembangunan	12	5	1	0	18
5	Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner	10	8	0	0	18
6	Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan	11	7	0	0	18
7	Ikut membantu agar pembangunan segera selesai, mengajukan proposal agar diberikan dana untuk melakukan perbaikan akibat gangguan pembangunan	8	7	3	0	18

3.4 Analisis Indeks Kepentingan

Hasil indeks kepentingan terhadap faktor penyebab serta cara mengatasi keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Hasil analisis indeks kepentingan

Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek	Mean	Ranking
A. Non Excusable Delays		
A1. Identifikasi aktivitas pembangunan	2,77	9

Infrastruktur		
A ₂ . Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja	3,22	5
A ₃ . Kualitas tenaga kerja yang buruk	3,56	3
A ₄ . Keterlambatan penyediaan alat/material	3,67	2
A ₅ . Keterlambatan proses pencairan dana desa	3,72	1
A ₆ . Kurangnya pengalaman TPK	3,44	4
A ₇ . Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja	3,00	7
A ₈ . Metode konstruksi/teknik pelaksanaan yang tidak tepat/salah	2,78	8
A ₉ . Koordinasi dan komunikasi yang buruk dalam organisasi proyek	2,56	10
A ₁₀ . Banyak hasil pekerjaan yang harus diulang/ diperbaiki karena cacat/salah	3,05	6
B. <i>Compensable Delays</i>		
B ₁ . Penetapan pelaksanaan jadwal proyek yang amat ketat	2,72	5
B ₂ . Persetujuan ijin kerja yang lama	2,67	6
B ₃ . Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi	3,00	4
B ₄ . Sering terjadi penundaan pekerjaan	3,33	3
B ₅ . Keterlambatan penyediaan material	3,61	2
B ₆ . Dana dari pemilik yang tidak mencukupi	3,67	1
C. <i>Excusable Delays</i>		
C ₁ . Terjadinya hal-hal yang tak terduga seperti banjir, badai, gempa bumi, tanah Longsor, cuaca buruk	3,22	3
C ₂ . Lingkungan sosial politik yang tidak stabil	3,33	2
C ₃ . Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek	3,44	1
C ₄ . Pembengkakan biaya proyek	3,11	6
C ₅ . Informasi proyek yang kurang lengkap	3,17	4
C ₆ . Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja	3,16	5

Tabel 7. Hasil analisis indeks kepentingan

Cara Mengatasi Keterlambatan Proyek	Mean	Ranking
1. Mengerahkan sumber daya tambahan	3,06	6
2. Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana	3,33	4
3. Jika tidak mungkin tetap pada rencana semula, diperlukan revisi jadwal, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan pekerjaan berikutnya	2,78	7
4. Meminta pertanggung jawaban TPK agar tetap menyelesaikan	3,67	1

	pembangunan tepat waktu. Jika terjadi kemunduran dikenakan denda keterlambatan pembangunan		
5.	Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner	3,56	3
6.	Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan	3,61	2
7.	Ikut membantu agar pembangunan segera selesai, mengajukan proposal agar diberikan dana untuk melakukan perbaikan akibat gangguan pembangunan	3,28	5

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui faktor penyebab keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam menurut urutan ranking adalah sebagai berikut :

- 1) *Non Excusable Delays* (Keterlambatan proses pencairan dana desa)
- 2) *Conpesable Delays* (Dana dari pemilik yang tidak mencukupi)
- 3) *Excusable Delays* (Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek).

Sedangkan untuk cara mengatasi keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam berdasarkan hasil Tabel 7 adalah sebagai berikut :

1. Meminta pertanggung jawaban TPK agar tetap menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Jika terjadi kemunduran dikenakan denda keterlambatan pembangunan
2. Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan
3. Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner
4. Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana
5. Ikut membantu agar pembangunan segera selesai, mengajukan proposal agar diberikan dana untuk melakukan perbaikan akibat gangguan pembangunan
6. Mengerahkan sumber daya tambahan
7. Jika tidak mungkin tetap pada rencana semula, diperlukan revisi jadwal, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan pekerjaan berikutnya.

3.5 Analisis Validitas

Uji vliditas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Sugiyono, 2012) [12]. Hasil Uji Validitas data responden dengan taraf signifikan sebesar 5 % disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil uji validitas

Variabel	r – Hitung	r - Tabel	Kesimpulan
<i>A. Non Excusable Delays</i>			
A ₁	0,7822	0,3780	Valid
A ₂	0,8630	0,3780	Valid
A ₃	0,8665	0,3780	Valid
A ₄	0,8507	0,3780	Valid
A ₅	0,8236	0,3780	Valid
A ₆	0,8329	0,3780	Valid

A ₇	0,8199	0,3780	Valid
A ₈	0,8124	0,3780	Valid
A ₉	0,8550	0,3780	Valid
A ₁₀	0,8795	0,3780	Valid
B. Conpesable Delays			
B ₁	0,8493	0,3780	Valid
B ₂	0,8355	0,3780	Valid
B ₃	0,8183	0,3780	Valid
B ₄	0,8514	0,3780	Valid
B ₅	0,8771	0,3780	Valid
B ₆	0,8265	0,3780	Valid
C. Excusable Delays			
C ₁	0,8713	0,3780	Valid
C ₂	0,8541	0,3780	Valid
C ₃	0,8065	0,3780	Valid
C ₄	0,8568	0,3780	Valid
C ₅	0,8714	0,3780	Valid
C ₆	0,8269	0,3780	Valid

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan pada 18 responden, dimana nilai r_{tabel} (korelasi *product moment*) dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,3780. Hasil uji validitas instrumen didapat seluruh pertanyaan mempunyai nilai rhitung lebih besar dari angka kritik tabel ($r\text{-tabel} = 0,3780$) artinya bahwa seluruh pertanyaan memiliki validitas yang baik dan layak digunakan untuk menjawab hasil penelitian.

3.6 Analisis Reliabilitas

Reliabilitas merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu digunakan oleh kelompok orang atau orang yang sama dalam waktu berlainan atau kalau instrumen digunakan oleh orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau waktu yang berlainan. Jika hasilnya konsisten, maka instrumen dapat dipercaya (*reliable*) atau dapat di andalkan (*dependen*) [15].

Uji reliabilitas dilakukan pada 18 responden yang sama dengan responden uji validitas pada proyek infrastruktur di Desa Babussalam Kecamatan Rambah. Dari hasil analisis uji reliabilitas instrumen penelitian diperoleh nilai produk momen atau nilai $r = 0,836$, jika dilihat dari Tabel 1 (Nilai koefisien korelasi R) pengukuran terhadap faktor penyebab serta cara mengatasi keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam memiliki nilai interpretasi yang tinggi. Artinya variabel instrumen penelitian dapat dikatakan *reliable*. Nilai interpretasi ini menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan pemerintah Desa Babussalam (aparatus desa, BPD dan kadus-kadus) memiliki tingkat konsistensi yang baik.

4. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam tahun 2023 menurut urutan ranking adalah : (a) *Non Excusable Delays* (Keterlambatan proses pencairan dana desa); (b) *Conpesable Delays* (Dana dari pemilik yang tidak mencukupi); (c) *Excusable Delays* (Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek).
2. Cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam untuk tahun yang akan datang adalah : (a) Meminta pertanggung jawaban TPK agar tetap menyelesaikan pembangunan tepat waktu; (b) Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan; (c) Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja,

menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner.

UCAPAN ERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan artikel jurnal ini:

1. Rektor UPP, LPPM-UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, dan atas arahan dan bimbingan selama proses penelitian serta bantuan hibah internal yang diberikan;
2. Pemerintah Desa Babussalam Kecamatan Rambah atas izin dalam pengisian data kuesioner kepada pihak pekerja proyek infrastruktur desa;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [2] Anonim. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- [3] Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dana Desa yang Bersumber dari Dana APBN.
- [4] Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi.
- [5] Anonim. Permendesa PD TT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa untuk Tahun 2024.
- [6] Dipohusodo. *Manajemen Proyek Dan Konstruksi Jilid 1 dan 2*. <https://id.scribd.com>document.2020> .
- [7] Ervianto I.W. *Manajemen Proyek Konstruksi*. <https://id.scribd.com>document.2021>.
- [8] Hidayat. A dan Afrina. Y. *Klasifikasi dan Peringkat dari Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Kegiatan Infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba*. <http://journal.upp.ac.id/index.php/aptek.2020>.
- [9] Kraiem, Z.K and Dickmann, J.E., *Concurrent Delays in Construction Projects*, *Journal of Construction Engineering and Management*, ASCE, vol. 113, no. 4, pp. 591-602, 1987.
- [10] O'Brien J.J., *CPM In Construction Management*, Cahner Book International Inc, Boston, 2019.
- [11] Pemerintah Desa Babussalam. *Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*.
- [12] Scott, S., *Delay Claims in U.K Contracts*. *Journal of Construction Engineering and Management*, ASCE, vol. 123, no. 3, 2017.
- [13] Usman., *Pengantar Statistik*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2018.